



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE-2 MARET 2025



KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[kumham_kalsel](#)



kalsel.kemenkum.go.id

Dorong Inovasi dan Kreativitas, Balangan Ajukan Raperda Perlindungan Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan pada Senin (10/03/2025). Rapat ini membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perlindungan kekayaan intelektual (KI) di wilayah Kabupaten Balangan. Rapat harmonisasi ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, serta Ketua DPRD Balangan, Lindawati.

Bupati Balangan mengajukan Raperda tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai langkah strategis untuk melindungi hasil karya masyarakat setempat, termasuk di bidang teknologi, seni, dan sastra. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada Hak Cipta, Paten, Merek, dan Indikasi Geografis. Pemerintah Kabupaten Balangan juga akan memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Dalam sambutannya, Nuryanti Widyastuti memperkenalkan Kemenkum yang telah bertransformasi, dan Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai perpanjangan unit pusat di wilayah. Ia juga menjelaskan bahwa pengharmonisasian peraturan perundang-undangan merupakan tugas dan fungsi Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta kekayaan intelektual selaras dengan tugas dan fungsi Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Anton Edward Wardhana menjelaskan jenis-jenis kekayaan intelektual seperti paten, cipta, merek, dan desain industri. Diskusi berjalan aktif, dengan jajaran perancang peraturan perundang-undangan memberikan saran dan masukan terkait Raperda yang diusulkan oleh Pemkab Balangan.



Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan Koordinasi Calon Notaris, Pastikan Proses Pelantikan Notaris Berjalan Lancar



Banjarmasin, AHU_Info – Menjelang pelantikan 36 Notaris baru di Kalimantan Selatan, tiga calon Notaris mengadakan silaturahmi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. bertempat di Lobby Kantor Wilayah ini bertujuan untuk mempererat hubungan serta mendiskusikan prosedur pelantikan yang akan segera dilaksanakan.

Tiga calon Notaris yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah M. Ferry Hidayat, S.H., M.Kn., Muhammad Isfansyah, S.E., S.H., M.Kn., dan Nadiya Karlina, S.H., M.Kn. Mereka disambut oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, beserta staf Bidang Administrasi Hukum Umum, Novita Sari.

Dalam kesempatan tersebut, para calon Notaris menanyakan berbagai hal terkait persyaratan dan prosedur pelantikan, sebagai bagian dari persiapan mereka untuk memasuki profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam bidang hukum. Dewi Woro Lestari menyambut baik kehadiran mereka dan memberikan penjelasan terkait teknis pelantikan serta harapan agar para Notaris baru nantinya dapat menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme dan integritas.

“Silaturahmi ini merupakan langkah awal yang baik dalam membangun sinergi antara calon Notaris dengan Kantor Wilayah. Kami berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional setelah dilantik,” ujar Dewi Woro Lestari.

Silaturahmi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Notaris lainnya dalam menjalankan peran mereka di masa depan serta membangun komunikasi yang baik dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas mereka. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara para Notaris dengan Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan guna mendukung pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.



Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Tim Pokja Bidang Kekayaan Intelektual 2025



Banjarmasin - Humas_info - Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Manusia Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin, (10/03), bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan langkah konkret dalam peningkatan pelayanan serta perlindungan KI di wilayah Kalimantan Selatan.

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, yang menekankan pentingnya peran Tim Pokja dalam mendukung penguatan sistem Kekayaan Intelektual di tahun 2025. Dalam arahannya, ia menegaskan tiga poin utama yang harus menjadi fokus kerja Tim Pokja, yaitu kolaborasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan, serta inovasi layanan dengan pemanfaatan teknologi guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan KI.

Dalam rangka mendukung peningkatan KI yang tahun ini mengusung Tematik Hak Cipta dan Desain Industri, Kantor Wilayah berkomitmen untuk menyediakan sarana, prasarana, serta pelatihan teknis yang dibutuhkan. Beberapa program prioritas yang akan dijalankan antara lain peningkatan kapasitas operator KI, inventarisasi data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), percepatan permohonan merek kolektif, diseminasi KI bagi sekolah/pesantren dan perguruan tinggi, peningkatan permohonan desain industri, serta fasilitasi pendampingan layanan KI. Selain itu, juga akan dilakukan pengelolaan data, perencanaan, serta penyusunan laporan kinerja di bidang pelayanan KI.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kekayaan Intelektual, Riswandi. Selain itu, turut hadir pula JFT/JFU Kantor Wilayah serta Helpdesk Pelayanan KI. Dengan pelaksanaan rapat ini, diharapkan Tim Pokja dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan membawa dampak positif dalam pengembangan serta perlindungan Kekayaan Intelektual di Kalimantan Selatan.



Rapat Konsolidasi Tim Pokja WBK, Kakanwil Kemenkum Kalsel Tekankan Integritas

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Konsolidasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Selasa, 11 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, serta dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Tim Pokja 1-6.

Kegiatan diawali dengan paparan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, selaku Ketua Pembangunan ZI. Dalam pemaparannya, Anton memberikan gambaran singkat mengenai peran Tim Pokja WBK serta progres yang telah dicapai.

“Kita sudah melakukan berbagai upaya dalam membangun Zona Integritas ini, dan konsistensi dari seluruh tim sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal,” ujarnya.

Dalam arahannya, Kakanwil Nuryanti Widyastuti menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Kejujuran adalah pondasi awal dalam mewujudkan WBK. Kita tidak hanya bekerja untuk meraih predikat, tetapi lebih dari itu, kita ingin membangun budaya kerja yang bersih dan profesional,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa partisipasi aktif dari seluruh unsur, termasuk pegawai PNS maupun tenaga outsourcing, sangat menentukan keberhasilan pembangunan Zona Integritas.

Lebih lanjut, Kakanwil mengingatkan bahwa penilaian terhadap pembangunan ZI dapat dilakukan kapan saja oleh Mystery Guest. Oleh karena itu, seluruh pegawai harus selalu bekerja dengan baik dan benar tanpa bergantung pada momen penilaian. Rapat ini juga menjadi ajang diskusi bagi seluruh peserta untuk membahas berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan ZI menuju WBK.



Ikuti Rakor Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran Ditjen AHU 2025, Kanwil Kalsel Siap Capai Realisasi Anggaran secara Efektif



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang, melalui platform Zoom pada Selasa (11/3). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewo Woro Lestari serta pelaksana pada Bidang AHU.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan percepatan realisasi anggaran belanja Ditjen AHU pada tahun 2025 serta optimalisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Beberapa poin utama yang dibahas dalam rapat ini meliputi evaluasi capaian anggaran, percepatan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana aksi (Renaksi) AHU, serta optimalisasi IKPA dan komitmen pelaksanaan anggaran.

Dalam evaluasi capaian anggaran kendala utama yang dihadapi adalah belum terbitnya rekening satuan kerja yang masih dalam proses oleh pihak bank. Menanggapi hal ini, Sesditjen AHU menekankan perlunya percepatan realisasi anggaran dengan memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat segera digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Terkait percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2025, disampaikan bahwa penyusunan rencana kegiatan serta pengadaan barang dan jasa harus segera dilakukan agar anggaran dapat terserap lebih awal dan tepat waktu. Kanwil juga diminta untuk memastikan bahwa seluruh belanja memenuhi standar Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) guna mencapai target nasional sebesar 96%.

Selanjutnya, dalam penyusunan rencana aksi (Renaksi) AHU, ditekankan bahwa percepatan anggaran harus disertai dengan target kinerja yang jelas. Namun, pada tahun 2025, belum ada rencana aksi yang ditetapkan untuk mencapai target tersebut. Penyelesaian rencana aksi masih menunggu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum RI sebagai dasar penyusunan kebijakan lebih lanjut.



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Raperkada Tapin, Bahas Pengadaan Barang/Jasa dan Sistem Kerja Pemda



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kabupaten Tapin, Selasa (11/03). Rapat Harmonisasi berlangsung di Balai Pertemuan Garuda membahas dua Raperkada, yakni tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah serta Sistem Kerja Pemerintah Daerah. Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana.

Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tapin, Taufiqurahman, dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar harmonisasi Raperkada ini dapat menghasilkan masukan konstruktif dari tim perancang peraturan perundang-undangan.

"Dengan adanya harmonisasi ini, kami berharap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Rini Yusnita, menekankan pentingnya harmonisasi ini dalam menjaga konsistensi produk hukum daerah. "Semoga dengan adanya harmonisasi ini, semua produk hukum dapat terkawal dengan baik dan diimplementasikan secara optimal," katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, memberikan apresiasi terhadap sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalsel. "Kami sangat mengapresiasi komitmen yang telah dibangun dalam proses harmonisasi ini. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalsel menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas," ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, JFT Analisis Hukum, Direktur PT Bastari Maju Tapin, Dewan Komisaris PT Bastari Maju, Direktur Bank Tapin, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tapin.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel Tinjau Kampung Sasirangan, Siapkan Pencanangan Kawasan Berbasis KI 2025



Banjarmasin, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Nuryanti Widyastuti, bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Riswandi dan Tim Layanan KI, melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Kampung Sasirangan Sungai Jingah Banjarmasin pada Selasa (11/3/2025). Kegiatan ini bertujuan memetakan potensi lokal sebagai persiapan pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual 2025, meliputi Kawasan Karya Cipta (KKC) dan Kawasan Desain Industri (KDI).

Kunjungan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin; Kecamatan Banjarmasin Utara; serta Kelurahan Sungai Jingah. Fokus utama kegiatan adalah identifikasi potensi karya cipta berbasis budaya, seperti motif tradisional sasirangan yang bernilai tinggi, serta produk turunan kreatif yang dapat dikembangkan dalam kerangka KDI.

Dalam diskusi dengan perajin dan pelaku usaha, tim menemukan tantangan klasik dalam pendaftaran hak cipta dan desain industri, seperti prosedur administratif yang rumit. Nuryanti Widyastuti menegaskan, pihaknya akan menyusun mekanisme pendampingan khusus untuk memudahkan perlindungan hukum aset intelektual lokal. "Kami juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait zonasi kawasan dan integrasi program Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual ke dalam agenda pembangunan daerah," ujarnya.

Riswandi menambahkan, kunjungan ini menjadi langkah awal penyusunan peta jalan kolaboratif antar-instansi guna mempercepat pencanangan KBKI 2025. "Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan kekayaan intelektual Banjarmasin, seperti sasirangan, tidak hanya dilindungi secara hukum tetapi juga berdaya saing di tingkat nasional maupun global," jelasnya.

Ke depan, rencana zonasi kawasan dan pendampingan administratif akan dirumuskan secara detail, dengan target akhir meningkatkan nilai ekonomi produk lokal melalui perlindungan KI. Diharapkan, Kampung Sasirangan Sungai Jingah akan menjadi percontohan kawasan berbasis KI pertama di Kalimantan Selatan.

Kemenkumham Kalimantan Selatan Terima Audiensi Komite Ekraf Banjarmasin Bahas Sinergi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menerima kunjungan audiensi dari Komite Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kota Banjarmasin pada Senin (10/03). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum ini bertujuan untuk membangun sinergi antara Kemenkumham dengan pemangku kepentingan Hexa Helix dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin.

Dalam pertemuan tersebut, Komite Ekraf juga mendiskusikan peran strategis Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kolaborasi Hexa Helix, khususnya terkait aspek hukum, perlindungan kekayaan intelektual, serta dukungan regulasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Selain itu, dalam audiensi ini Komite Ekraf Kota Banjarmasin menyampaikan permohonan kontribusi tulisan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan untuk buku berjudul "Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Perspektif Hexa Helix".

Buku tersebut merupakan bagian dari program kerja Komite Ekraf Periode 2020-2025 dan dirancang sebagai platform kolaboratif yang menghimpun pemikiran strategis dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah. Komite Ekraf juga menyampaikan progres persiapan buku, dengan jadwal penerimaan naskah hingga Februari 2025 dan rencana peluncuran pada April 2025.

Diskusi dalam audiensi ini juga menyoroti upaya optimalisasi peran Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendorong inovasi hukum, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, serta integrasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor kreatif. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kekayaan Intelektual, Riswandi, serta JFT Analisis KI Ahli Muda, M. Ajie Rifani.



Dean Ruben James Resmi WNI, melengkapinya skuad Timnas Indonesia



Roma, 10 Maret 2025 – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan olahraga nasional dengan memberikan kewarganegaraan kepada tiga atlet sepak bola melalui mekanisme naturalisasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (Sekjen Kemenkum), Nico Afinta yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo, dan Kuasa Usaha Ad Interim Tika Wihanasari, resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan yang berlangsung di Roma, Senin 10 Maret 2025. Tiga atlet tersebut adalah, Emil Audero Mulyadi (Italia), Joey Mathijs Pelupessy (Belanda) dan Dean Ruben James (Belanda).

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Nico Afinta, dalam sambutannya menegaskan bahwa naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata, " Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia," ujar Sekjen Kemenkum.

Naturalisasi Atlet diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dalam hal ini pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.

Pada proses naturalisasi ini Kementerian Hukum juga didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait.

Serta partisipasi semua pihak, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan PSSI. Selain itu para atlet juga harus melalui serangkaian tahapan termasuk mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Bertambahnya pemain berkualitas dalam skuad Tim Nasional Indonesia diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional. Beberapa agenda besar yang menjadi target utama di antaranya: FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, Peringkat 100 besar FIFA dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday. Hal ini merupakan cita cita besar seluruh bangsa Indonesia demikian pula Presiden Prabowo.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti mengungkapkan pemberian kewarganegaraan melalui mekanisme naturalisasi kepada Emil Audero Mulyadi, Joey Mathijs Pelupessy, dan Dean Ruben James mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung kemajuan olahraga nasional.

"Proses ini tidak hanya memperkaya skuad Tim Nasional Indonesia dengan pemain berkualitas, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kebijakan kewarganegaraan kita dapat berperan strategis dalam pencapaian prestasi di tingkat internasional. Sebagai bagian dari Kementerian Hukum, kami di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan turut mendukung penuh upaya ini dan terus berkomitmen dalam menjalankan peraturan kewarganegaraan sesuai amanat undang-undang demi kepentingan negara serta kebanggaan bangsa," ungkapnya.

Kemenkum Kalsel Gelar Koordinasi Pemetaan Produk Unggulan dan Merek Kolektif Banjar untuk Dorong Perlindungan KI



Banjar, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar kegiatan Koordinasi Pemetaan Produk Unggulan Daerah dan Merek Kolektif Kabupaten Banjar pada Selasa (11/3/2025).

Acara yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar ini dihadiri langsung Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Riswandi dan Tim Layanan KI. Turut hadir Kepala Dinas, I Gusti Made Suryawati untuk membahas strategi penguatan perlindungan hukum produk lokal berbasis kearifan lokal.

Kegiatan ini bertujuan menginventarisasi potensi produk unggulan dan merek kolektif khas Banjar yang dapat dilindungi secara hukum, seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan produk pertanian. Riswandi menekankan, upaya ini menjadi langkah krusial untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus melindungi aset intelektual daerah. "Kami fokus pada identifikasi produk yang memiliki ciri khas lokal, sekaligus memetakan hambatan pelaku usaha dalam pendaftaran KI," ujarnya.

Dalam diskusi terungkap beberapa tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran merek kolektif dan kekayaan intelektual. Riswandi menyatakan, pihaknya akan menyusun panduan praktis untuk memudahkan pelaku usaha mengakses layanan KI. "Kami juga mengintegrasikan data produk unggulan ke dalam database kekayaan intelektual daerah agar lebih terukur dan terkelola," tambahnya.

Selain itu, koordinasi ini membahas rencana sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dengan Pemkab Banjar untuk menyusun rekomendasi kebijakan terpadu. "Target kami, produk-produk Banjar tidak hanya dikenal secara lokal, tetapi juga terlindungi secara hukum dan mampu bersaing di pasar nasional," tegas Riswandi.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat pendaftaran KI, termasuk pendampingan administratif bagi UMKM. Diharapkan, langkah ini menjadi pondasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

Kanwil Kemenkum Kalsel Siapkan Analisis dan Evaluasi Perda Tahun 2025



Banjarmasin, Hukum_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) terus berupaya memastikan kebijakan hukum daerah sejalan dengan kepentingan masyarakat dan program nasional. Dalam rangka itu, Kanwil Kemenkum Kalsel menggelar rapat penting di Ruang Rapat Divisi Administrasi, membahas pemilihan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dianalisis dan dievaluasi sepanjang tahun 2025.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi, Sri Yunita, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta tenaga ahli, termasuk analis hukum muda dan pertama, penyuluh hukum, serta staf humas. Diskusi ini bertujuan untuk mengkaji Perda mana saja yang perlu dianalisis lebih lanjut guna mendukung efektivitas regulasi di tingkat daerah. Dalam pemaparannya, Sri Yunita menjelaskan bahwa hingga saat ini, 13 Perda telah diinventarisasi dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Perda-perda tersebut telah diajukan oleh pemerintah daerah dan akan ditelaah lebih lanjut untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas dalam analisis dan evaluasi tahun ini.

"Kami telah menerima sejumlah Perda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Setelah melakukan kajian awal, kami mengidentifikasi beberapa yang paling relevan untuk ditelaah lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan tema nasional yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa tema yang menjadi fokus utama analisis tahun ini mencakup Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi Komoditas, Makanan Bergizi Gratis, dan Pengelolaan Lahan. Sejumlah Perda yang dianggap selaras dengan tema tersebut telah dipilih untuk dianalisis lebih dalam. Beberapa Perda yang menjadi perhatian dalam tahap analisis ini di antaranya adalah Perda Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, yang dinilai memiliki dampak besar dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan. Selain itu, dari Kabupaten Tabalong, terdapat lima Perda yang akan ditelaah, termasuk Perda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menurut Mariana Rahmi, salah satu Analis Hukum Pertama di Kanwil Kemenkum Kalsel, seluruh hasil inventarisasi ini telah dituangkan dalam laporan persiapan B02-B03 yang telah disampaikan kepada BPHN. Tahapan selanjutnya adalah analisis dan evaluasi mendalam, yang akan dilakukan pada periode B04 hingga B09 tahun 2025.

"Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan di daerah benar-benar efektif dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Kami berharap analisis ini dapat membantu memperbaiki aturan yang ada, sehingga dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat Kalimantan Selatan," ujarnya.

Dengan adanya proses ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap regulasi yang diterapkan di tingkat daerah dapat lebih adaptif dan selaras dengan kebutuhan serta perkembangan zaman.

Rapat Harmonisasi: Kanwil Kemenkum Kalsel Bahas Ranperda Pengendalian Gratifikasi dan Pengaduan Masyarakat Bersama Inspektorat Kab. HST



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) atas dua Ranperda yang tengah disusun, yaitu Rancangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Rancangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kegiatan rapat yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel pada Rabu (12/3/25) dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana. Rapat ini turut dihadiri oleh para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ainur Rafiq, beserta jajaran.

Dalam paparannya, Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ainur Rafiq, menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bertujuan sebagai pedoman bagi ASN atau penyelenggara negara dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola gratifikasi. Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan ASN terhadap ketentuan gratifikasi serta membangun integritas aparatur sipil negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya aturan ini, diharapkan pula terwujud lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara itu, terkait dengan Rancangan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat, regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang efektif, efisien, serta transparan. Selain itu, sistem ini dirancang agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa harmonisasi Ranperda dilakukan untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun dibawahnya. Ia juga menyampaikan bahwa dalam rapat ini, pihaknya memberikan tanggapan serta perbaikan terhadap rancangan yang sedang dibahas.



Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Ranperda kepada Inspektorat Kabupaten HST

Banjarmasin, Humas_Info – Setelah melalui proses harmonisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyerahkan hasil perbaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Dua Ranperda yang telah disempurnakan tersebut meliputi Rancangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Rancangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Serah terima hasil harmonisasi dilakukan dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel pada Rabu (12/3/25). Acara ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, dan dihadiri oleh para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ainur Rafiq, beserta jajarannya.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ainur Rafiq, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Kalsel atas proses harmonisasi yang telah dilakukan. Ia menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ini sangat penting untuk memperkuat pedoman bagi ASN dan penyelenggara negara dalam pengendalian gratifikasi serta meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana, menjelaskan bahwa hasil perbaikan Ranperda telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dibawahnya. “Kami memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat, serta dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.

Dengan diserahkannya hasil harmonisasi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan dapat segera melanjutkan proses lebih lanjut hingga Ranperda disahkan menjadi peraturan daerah yang sah. Kanwil Kemenkum Kalsel juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi yang berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kemenkum Kalsel Ikuti FGD Bahas Peran Strategis Perancang Peraturan Perundang-undangan



Banjarmasin, PPPH_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) turut serta dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkumham RI pada Rabu (12/03/2025). Diskusi daring melalui Zoom ini membahas analisis kebijakan dengan topik "Rencana Peraturan Menteri Hukum tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan".

FGD ini diikuti oleh Danang Agung Nugroho dan Wira Ariyanti, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dari Kanwil Kemenkum Kalsel. Diskusi ini menghadirkan Cahyani Suryandari, Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan RI, yang memaparkan peran strategis Perancang Peraturan Perundang-Undangan (PPU) dalam pembentukan regulasi serta hambatan dalam pelaksanaan jabatan fungsional tersebut.

Cahyani menekankan bahwa PPU memiliki peran kunci sebagai arsitek dalam pembentukan regulasi. Mereka bertanggung jawab menyusun norma hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan implementasi yang efektif di masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan, perancang terlibat di berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Berdasarkan Pasal 14 PP 12/2018, pemerintah daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang dalam setiap tahapan pembentukan regulasi. Selain itu, Pasal 45 dan 46 peraturan yang sama mengatur keterlibatan perancang dalam Panitia Antar-Kementerian dan penyusunan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah.

FGD ini menyoroti urgensi penyusunan Peraturan Menteri Hukum tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPU. Diskusi ini membahas perlunya regulasi yang lebih jelas dalam mengatur peran dan tugas perancang, dengan mempertimbangkan harmonisasi antara Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2023. Hasil FGD ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan yang lebih kuat untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan jabatan fungsional perancang di masa depan.



Tapin Akan Miliki Layanan Kekayaan Intelektual, Kemenkum Kalsel Lakukan Koordinasi



Rantau, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapin terkait pembentukan layanan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah tersebut. Koordinasi ini berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tapin pada Rabu, (12/03/2025).

Pertemuan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti beserta jajarannya, serta Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, Nurul, dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Tapin, Mahdiati.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi peningkatan layanan publik di bidang KI untuk mendukung ekosistem inovasi dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Tapin.

Beberapa poin penting yang dibahas meliputi:

- (1) Koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten Tapin: Pembahasan rencana pembentukan layanan KI di MPP Kabupaten Tapin, serta diskusi mengenai kesiapan sarana dan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Strategi Peningkatan Layanan Publik: Penekanan pada pentingnya layanan KI dalam mendukung ekosistem inovasi dan daya saing daerah, serta peran layanan ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan inovator.
- (3) Pembahasan Mekanisme Teknis: Pembahasan alur pelayanan dan prosedur administrasi bagi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung layanan ini.

Pembentukan layanan KI ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas di Kabupaten Tapin, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pelaku usaha dan pencipta karya intelektual.



Pendampingan Indikasi Geografis dan Desain Industri, Kemenkum Kalsel Kunjungi Sentra Kopiah Jangang



Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, bersama jajaran melakukan kunjungan ke Kawasan Sentra Industri Kopiah Jangang di Kabupaten Tapin pada Rabu, (12/3/25). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran potensi indikasi geografis serta desain industri bagi produk lokal khas daerah tersebut.

Dalam kegiatan ini, Kakanwil Kemenkum Kalsel didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kekayaan Intelektual, Riswandi beserta JFT/JFU Pelayanan KI. Pada kesempatan ini rombongan Kemenkum Kalsel juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan Bappedalitbang Kabupaten Tapin, guna merumuskan strategi pendampingan bagi pelaku usaha industri kopiah Jangang.

“Kami ingin memastikan bahwa produk lokal seperti kopiah Jangang memiliki perlindungan hukum yang kuat, baik dari sisi indikasi geografis maupun desain industri. Dengan demikian, produk ini dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik di pasar nasional maupun internasional,” ujar Nuryanti Widyastuti dalam kesempatan tersebut.

Selama kunjungan, rombongan berdiskusi langsung dengan para pelaku usaha mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam proses perlindungan kekayaan intelektual. Salah satu fokus utama adalah bagaimana penguatan legalitas dapat meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan usaha masyarakat setempat. Langkah ini juga menjadi bagian dari penyusunan peta jalan peningkatan nilai ekonomi produk lokal di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap koordinasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha lokal, sehingga industri tradisional seperti kopiah Jangang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” tambah Nuryanti Widyastuti. Kunjungan ini menjadi tahap awal dalam upaya Kanwil Kemenkum Kalsel untuk memperkuat daya saing industri daerah melalui perlindungan hukum dan fasilitasi kekayaan intelektual.



Pendaftaran Kopiah Jangang sebagai IG dan Pencanangan Kawasan Desain Industri di Kabupaten Tapin



Tapin, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar koordinasi terkait progres tindak lanjut rencana pendaftaran Kopiah Jangang sebagai Indikasi Geografis serta pencanangan Sentra Kopiah Jangang sebagai Kawasan Sentra Industri di Kabupaten Tapin. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, (12/03) bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi serta pejabat fungsional (JFT/JFU) dari Kanwil Kemenkum Kalsel.

Pertemuan ini diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, H. Sufiansyah. Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tapin sepakat untuk mendaftarkan Kopiah Jangang sebagai Indikasi Geografis guna melindungi produk khas daerah sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi para pengrajin lokal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap produk khas daerah serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Kalsel juga memastikan bahwa kawasan sentra industri Kopiah Jangang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dicanangkan sebagai salah satu Kawasan Desain Industri di Kabupaten Tapin. Dengan pencanangan ini, diharapkan industri Kopiah Jangang semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Sebagai bagian dari upaya penguatan layanan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Kalsel mendorong Pemerintah Kabupaten Tapin untuk menginventarisasi produk unggulan yang berpotensi didaftarkan dalam berbagai bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Merek, maupun Desain Industri. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk khas daerah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan dorongan kepada Lurah dan Camat di Kabupaten Tapin untuk berpartisipasi dalam ajang Paralegal Justice Award. Ajang ini diharapkan dapat meningkatkan peran aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan langkah konkret dalam pendaftaran Kopiah Jangang sebagai Indikasi Geografis serta pengembangan kawasan desain industri di Kabupaten Tapin dapat segera terealisasi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap produk daerah, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi dan industri kreatif berbasis kearifan lokal.



Bahas Ranperda Penggabungan Desa dan Sengketa Tanah di Balangan, Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Kamis, (13/03), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Erik Yulianto, serta dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana. Dari Kabupaten Balangan, rapat dihadiri oleh Plt. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Ernawati, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setda Balangan, Akhmad Fauzi.

Rapat harmonisasi kali ini membahas dua Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, yaitu Ranperda tentang Penggabungan Desa Wonorejo dan Sumber Rezeki di Kecamatan Juai serta Ranperda tentang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah/Lahan.

Dalam sambutannya, Ernawati menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum yang dihasilkan. “Kami berharap agar hasil dari Ranperda ini maksimal, agar terus dipantau dan dievaluasi guna memastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan harmonisasi diawali dengan analisis dari Analis Hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mendalam oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan. Selama diskusi, berbagai aspek normatif dan teknis dari kedua Ranperda dikaji agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa harmonisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

“Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan Ranperda yang dihasilkan memiliki output dan outcome yang berkualitas serta lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya rapat harmonisasi ini, diharapkan Ranperda yang disusun dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Balangan, khususnya dalam penyelesaian persoalan administratif maupun sosial yang berkaitan dengan penggabungan desa serta sengketa lahan.



MPD Notaris dan Notaris Pengganti Siap Bertugas



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tabalong serta Notaris Pengganti Kota Banjarmasin dan Notaris Pengganti Kota Banjarbaru.

Kegiatan ini berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan pada Kamis (13/3/25), dengan dihadiri jajaran Pejabat Struktural dan Pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel serta para tamu undangan.

Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya yakni:

1. Eko Herdianto, S.H., M.M. sebagai Anggota MPD Notaris Kabupaten Tabalong;
2. Dianor, S.H., M.H. sebagai Anggota MPD Notaris Kabupaten Banjar;
3. Danang Agung Nugroho, S.H. sebagai Anggota MPD Notaris Kabupaten Banjar;
4. Rika Mega Mustika, S.H. sebagai Notaris Pengganti menggantikan sementara Notaris Kota Banjarmasin, Mery Liana, S.H., M.Kn. yang melaksanakan cuti sejak 17-27 Maret 2025;
5. Ellita Yoandini, S.H., M.Kn. sebagai Notaris Pengganti menggantikan sementara Notaris Kota Banjarbaru, Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. yang melaksanakan cuti sejak 9 April 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.



Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menekankan pentingnya peran strategis Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam membina, mengawasi, dan menegakkan aturan dalam profesi kenotariatan.

“Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus menjadi ujung tombak pengawasan notaris yang paling dekat dengan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pengawasan terhadap notaris di daerah dilakukan secara ketat agar praktik kenotariatan tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat bagaimana tantangan dalam bidang kenotariatan semakin kompleks. Aduan dari masyarakat yang diterima baik oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris maupun Majelis Kehormatan Notaris harus segera ditindaklanjuti dengan prosedur yang tepat agar memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, kepada Notaris Pengganti yang baru dilantik, ia berpesan agar selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas, terutama dalam pembuatan akta, waarmerking, serta legalisasi perjanjian.

“Saya juga menekankan pentingnya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam setiap layanan kenotariatan,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Nuryanti Widyastuti mengucapkan selamat kepada seluruh anggota MPDN dan Notaris Pengganti yang telah dilantik.



Menkum Supratman Ajak Media Massa Bersinergi dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan media massa guna mensosialisasikan capaian dan target kinerja yang telah dilakukan. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada acara silaturahmi keluarga besar Kemenkum dengan kalangan pemimpin redaksi (Pemred) media.

Supratman mengatakan kegiatan silaturahmi perlu dilakukan secara terus-menerus agar Kemenkum dan media massa bisa bersinergi dan berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing. "Seluruh program-program di Kementerian Hukum perlu disosialisasikan, dengan demikian bantuan teman-teman pers terkait capaian dan kinerja di Kementerian Hukum tentu akan semakin baik dan akan diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia;" kata Supratman di Graha Pengayoman Kemenkum, Kamis (13/03/2025).

Sementara itu, Irfan Junaidi mewakili Pemred media mengatakan sinergi dan kerja sama antara media dan Kemenkum menjadi hal yang sangat penting dalam menyebarkan informasi yang benar dan jelas. Pasalnya, banyak sekali arus informasi yang beredar sehingga berpotensi menghadirkan informasi yang membingungkan atau "keruh". "Kita sama-sama dapat berbagi peran dalam mewarnai berbagai informasi yang akhir-akhir ini cenderung keruh," ujarnya.

Irfan menilai saat ini perkembangan informasi dan pertumbuhan media yang pesat dapat menimbulkan persaingan yang tidak berimbang. Untuk itu, kalangan media mengharapkan kehadiran pemerintah untuk mendukung media dalam menciptakan persaingan yang lebih adil. "Saya kira perlu juga adanya ekosistem media sebagai wadah untuk menghadapi persaingan yang tidak berimbang, dan negara hadir dalam rangka memberikan tata aturan main supaya persaingan ini menjadi lebih adil dan sama," tambahnya.

Menjawab hal tersebut, Menteri Supratman mengatakan Kemenkum akan menerima masukan-masukan dari kalangan pers. Kemenkum akan membuat regulasi yang dapat mengakomodir pertumbuhan platform atau media-media yang baru agar terjadi keseimbangan. "Saya nanti akan meminta kepada Dirjen Peraturan Perundang-Undangan untuk berdiskusi dengan teman semua khususnya tentang pers. Tentunya kita juga perlu melakukan dialog dan akan menjadi muatan substansi regulasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada," ucap Supratman di penghujung dialognya bersama para Pemred media.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widayastuti:1 menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel menyambut baik ajakan Menteri Hukum untuk bersinergi dengan media massa dalam pembangunan hukum di Indonesia.

"Sinergi ini menjadi krusial agar kebijakan dan program Kemenkum dapat tersosialisasi secara luas, serta masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Kami siap untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan insan pers di daerah, guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek hukum dan pelayanan publik yang kami berikan," ucapnya.



Lindungi Budaya Indonesia, Kemenkum Sahkan Kerja Sama dengan Kemenbud

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual yang terkait dengan kebudayaan. Pengesahan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara Menteri Hukum dan Menteri Kebudayaan, yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pemerintah Indonesia memiliki peran yang krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi hasil karya budaya bangsa. Dengan perlindungan yang tepat, bangsa Indonesia dapat mencegah penyelewengan terkait hak cipta sekaligus menghargai para pencipta, seniman, dan pelaku budaya.

“Kita tidak hanya dapat mencegah penyalahgunaan hak cipta, tetapi juga memberikan penghargaan yang layak bagi para pencipta dan pelaku budaya atas hasil karya mereka,” ujar Supratman dalam acara penandatanganan kerja sama, Jumat (14/03/2025) di gedung Kemendikdasmen.

Perlindungan kekayaan intelektual, lanjutnya, akan memicu kreativitas masyarakat Indonesia untuk berinovasi guna memperkaya budaya Indonesia.

“Perlindungan ini juga akan membuka ruang bertambahnya kreativitas dan inovasi di dunia kebudayaan, yang pada gilirannya akan memperkaya khazanah budaya Indonesia dan meningkatkan posisi kita di dunia internasional,” ucapnya.

Lulusan ilmu hukum Universitas Muslim Indonesia ini menjelaskan Indonesia memiliki aset dan kekayaan budaya yang luar biasa. Namun di saat yang sama, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri. Sehingga kerja sama antara Kemenkum dan Kemenbud sangat penting untuk mendukung keberlanjutan kebudayaan Indonesia.

“Kerja sama kita, baik NK maupun PKS, bertujuan untuk memperkuat upaya perlindungan hak-hak kekayaan intelektual terhadap objek-objek budaya yang semakin berkembang. Kerja sama ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan intelektual dan budaya nasional,” tutur Supratman.

Ia berharap kerja sama Kemenkum dan Kemenbud dapat mempercepat langkah-langkah konkret yang lebih efektif untuk pembangunan kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik ke depannya. Kerja sama yang dilakukan saat ini pun akan menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

Senada dengan Supratman, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengatakan dua bentuk kerja sama yang baru saja ditandatangani ini merupakan langkah strategis Kemenkum dan Kemenbud untuk memajukan kebudayaan Indonesia, termasuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkannya bagi kepentingan seluruh warga Indonesia.

“Kita pastikan objek-objek pemajuan kebudayaan yang jumlahnya ada sepuluh, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional memiliki nilai ekonomi,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, turut mendukung penuh kerja sama ini. Menurutnya, langkah ini akan memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya daerah, termasuk warisan budaya Kalimantan Selatan yang kaya akan seni, tradisi, dan kearifan lokal.

“Kami di daerah siap mendukung implementasi kerja sama ini dengan memastikan kekayaan budaya lokal, seperti sasirangan, mamanda, dan tradisi lisan suku Banjar, mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Dengan demikian, budaya kita tidak hanya lestari, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Nuryanti.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumhamkalsel](#)



[kumham_kalsel](#)



[kalsel.kemenkumham.go.id](#)